



Kebakaran di Bromo Meluas

Petugas gabungan berupaya memadamkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Blok Bantengan, kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, Selasa (4/8/2026). Kebakaran yang dipicu musim kemarau tersebut telah meluas dari Blok Bantengan di Kabupaten Lumajang hingga kawasan Watu Gede di Kabupaten Probolinggo dengan luas terdampak mencapai 7,9 hektare. Meski titik api yang mengarah ke Probolinggo dilaporkan berhasil dipadamkan, petugas tetap bersiaga mengantisipasi kemunculan api baru akibat angin kencang. Demi keselamatan pengunjung dan kelancaran operasi pemadaman, Balai Besar TNBTS menutup sementara akses wisata melalui Jemplang, Coban Trisula, dan Senduro, sementara wisatawan hanya diperbolehkan mengakses kawasan Lautan Pasir. (ist.antara)

9 KEJANGGALAN

VERSI KUASA HUKUM FEBRIE



Penetapan Tersangka Terburu-buru
Dinilai mengabaikan kehati-hatian.



Predicate Crime Tidak Jelas
Dugaan korupsi asal TPPU dianggap kabur.



Dugaan Pemaksaan Perkara - Status
tersangka dianggap dipaksakan sebelum dua
alat bukti dinilai terpenuhi.

PERLAWANAN SANG MANTAN JAMPIDSUS

Daftarkan Dua Praperadilan, Pertanyakan Penyitaan Emas dan Uang Ratusan Miliar

Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah, mengambil langkah hukum dramatis. Melalui kuasa hukumnya, Febrie resmi mengajukan dua permohonan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Langkah hukum balasan ini ditempuh guna menguji secara menyeluruh keabsahan serangkaian tindakan penegakan hukum yang ditujukan kepadanya. Mulai dari penetapan status tersangka tindak pidana pencucian uang (TPPU), pelaksanaan penahanan, hingga prosedur penggeledahan dan penyitaan barang bukti fantastis berupa emas seberat 74 kilogram serta uang tunai bernilai Rp543 miliar. Di sisi lain, Jaksa Agung ST Burhanuddin secara resmi memberhentikan sementara Febrie Adriansyah dari statusnya sebagai jaksa. Penonaktifan ini diambil sebagai prosedur baku agar pemeriksaan perkara berjalan objektif. BACA SELENGKAPNYA DI HAL 11....



Prosedur Penahanan
Diduga melanggar ketentuan KUHP.



Uang Rp543 Miliar - Asal-usul dana
belum dibuktikan transparan



Dua Batu Uji Hukum - Penerapan
aturan dianggap membingungkan.



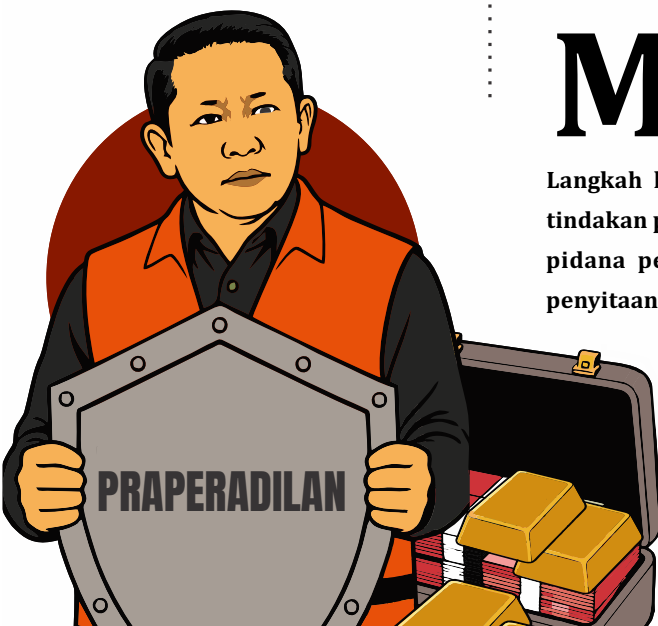
Emas 74 Kg - Kepemilikan belum
dibuktikan secara terbuka.



Penggeledahan & Penyitaan -
Dinilai menabrak prosedur hukum.



Subjek & Objek Penyidikan -
Penyidikan dan penyitaan dinilai tercampur.



PRABOWO LARANG HARGA BBM SUBSIDI NAIK, NONSUBSIDI IKUTI PASAR

Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan pemerintah untuk mempertahankan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi agar tidak mengalami kenaikan di tengah ketidakpastian harga minyak dunia. Pada saat yang sama, pemerintah juga membuka peluang penurunan harga BBM nonsubsidi apabila harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) kembali melemah mengikuti kondisi pasar global.

Arahan tersebut disampaikan Prabowo dalam rapat terbatas bersama sejumlah menteri di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (4/8/2026). Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan, dinamika harga minyak dunia menjadi salah satu pokok pembahasan dalam pertemuan tersebut.

"Arahan Bapak Presiden memerintahkan agar menjaga harga BBM subsidi untuk tidak boleh

dinaikkan," kata Bahlil usai rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (4/8/2026).

Menurut Bahlil, kebijakan berbeda akan diterapkan terhadap BBM nonsubsidi yang memang mengikuti perkembangan harga energi di pasar. Pemerintah, kata dia, akan mempertimbangkan penyesuaian harga apabila ICP mengalami penurunan.

"Kalau memang harga ICP dunia turun, kita yang nonsubsidinya juga

dipertimbangkan untuk disesuaikan dengan harga pasar. Kalau turun ya turun, jangan dinaikkan," ujar Bahlil.

Pernyataan itu mengisyaratkan pemerintah tidak hanya berupaya menjaga daya beli masyarakat melalui stabilitas harga BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Solar, tetapi juga membuka ruang agar konsumen BBM nonsubsidi memperoleh manfaat ketika harga minyak global menurun.

Saat ini, harga BBM nonsubsidi masih berada pada level tinggi seiring kenaikan harga minyak dunia dalam beberapa waktu terakhir. Di DKI Jakarta, misalnya, harga Pertamina tercatat mencapai Rp15.950 per liter.

ICP sendiri merupakan harga rata-rata minyak mentah Indonesia yang menjadi salah satu indikator utama dalam penyusunan kebijakan sektor energi nasional. Nilai ICP digunakan pemerintah sebagai acuan dalam



Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia.

Bahlil Akui Ada Blackout di Kalimantan

MENTERI Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengakui pemadaman listrik atau blackout masih terjadi di sejumlah titik di Pulau Kalimantan. Persoalan tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (4/8/2026).

Dalam rapat itu, Prabowo memerintahkan Kementerian ESMD segera berkoordinasi dengan PT PLN (Persero) untuk mengambil langkah-langkah terukur agar gangguan kelistrikan dapat segera dipulihkan.

"Di dalam pembahasan itu, salah satu di antaranya kami bahas adalah persoalan PLN, persoalan listrik yang

kami harus akui di beberapa wilayah, khususnya di Kalimantan, masih ada pemadaman-pemadaman beberapa titik," kata Bahlil.

Menurut Bahlil, Presiden meminta persoalan tersebut segera ditangani agar aktivitas masyarakat maupun dunia usaha tidak terus terganggu.

"Dan karena itu Bapak Presiden memerintahkan kepada saya untuk segera melakukan langkah-langkah yang terukur dengan PLN agar bisa menyelesaikan dengan baik," ujarnya.

Bahlil menegaskan, berdasarkan laporan awal dari PLN, pemadaman bukan disebabkan kekurangan pasokan energi primer seperti batu bara, gas, maupun bahan bakar pembangkit. Pasokan listrik dari sisi

pembangkitan dipastikan mencukupi.

Masalah justru diduga berasal dari aspek teknis, yakni pekerjaan pemeliharaan sistem kelistrikan dan gangguan pada jaringan transmisi yang menghubungkan pasokan listrik ke pelanggan. Gangguan pada jaringan tersebut menyebabkan aliran listrik di sejumlah wilayah Kalimantan harus dipadamkan.

"Menurut informasi dari PLN itu terkait dengan pemeliharaan. Bukan persoalan energinya, energinya enggak ada masalah. Jadi ada pemeliharaan yang terjadi, bahkan ada beberapa, konon cerita dari PLN bahwa terkait dengan jaringannya juga," kata Bahlil.

Ia memastikan pemerintah bersama PLN tengah mempercepat penanganan agar sistem kelistrikan kembali normal dalam waktu dekat.

"Oke, tapi kami akan selesaikan waktu dekat," ujar Bahlil.(gus,rls/dya)

TERBARU! DAFTAR HARGA BBM DI INDONESIA

Pertamax Turbo

Rp 18.300 / liter

Dexlite

Rp 19.700 / liter

Pertamina Dex

Rp 21.150 / liter

Pertamax Green

Rp 16.600 / liter

Pertamax

Rp 15.950 / liter

Pertalite

Rp 10.000 / liter

Biosolar

Rp 6.800 / liter



menghitung besaran subsidi energi, menetapkan asumsi makro di APBN, hingga mengevaluasi kebijakan harga BBM.

Selama ini, harga BBM bersubsidi ditetapkan pemerintah dengan mempertimbangkan berbagai faktor, antara lain perkembangan harga minyak mentah dunia, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, serta kemampuan fiskal negara dalam menanggung subsidi. Berbeda dengan itu, harga BBM nonsubsidi dievaluasi secara berkala mengikuti pergerakan harga minyak dan mekanisme pasar.

Selain membahas kebijakan harga BBM, Bahlil mengungkapkan rapat bersama Presiden juga menyinggung persoalan pemadaman listrik bergilir yang terjadi di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Menurut dia, gangguan tersebut disebabkan persoalan pemeliharaan infrastruktur, bukan karena kekurangan pasokan energi.

Rapat juga membahas pelaksanaan program hilirisasi pada perusahaan-perusahaan tambang yang memperoleh perpanjangan izin dari Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)..(tin,ist/dya)

ISU PERGANTIAN KAPOLRI MENGUAT, DPR TEGASKAN BELUM TERIMA SURPRES

Isu pergantian Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) kembali mengemuka di tengah perhatian publik terhadap dinamika penegakan hukum dalam beberapa pekan terakhir. Spekulasi itu menguat setelah beredar kabar Presiden Prabowo Subianto telah mengirimkan surat presiden (surpres) kepada DPR RI untuk mengganti Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo. Namun hingga Selasa (4/8/2026), belum ada dokumen resmi yang menunjukkan Presiden telah mengajukan calon Kapolri kepada DPR. Pimpinan Komisi III DPR maupun pemerintah juga belum mengonfirmasi kabar tersebut.

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menegaskan informasi mengenai surpres pergantian Kapolri tidak benar. Menurutnya, DPR sama sekali belum menerima surat dari Presiden terkait pergantian pimpinan Polri.

"Tidak benar ada surat presiden soal penggantian Kapolri. Kami mengimbau sebaiknya masyarakat jangan terpengaruh dengan isu-isu yang tidak benar dan tidak ada dasarnya," ujar Habiburokhman, Selasa (4/8/2026).

Pernyataan senada juga disampaikan Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni yang memastikan hingga kini belum ada surpres yang masuk ke DPR. Ia bahkan menilai kinerja Jenderal Listyo Sigit Prabowo masih baik, meski mengakui isu pergantian wajar muncul mengingat masa jabatan Kapolri telah memasuki tahun kelima.

Dari pihak pemerintah, Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investasi Khusus (Bappisus) Aries Marsudiyanto tidak memberikan jawaban tegas ketika ditanya mengenai isu pergantian Kapolri.

Saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Aries hanya mengatakan publik diminta menunggu.

"Tunggu tanggal dan waktunya."

Ketika kembali ditanya apakah Presiden telah mengirimkan surpres kepada DPR, Aries mengulangi jawaban yang sama tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut.

Isu pergantian Kapolri muncul beriringan dengan meningkatnya perhatian publik terhadap perkembangan perkara hukum yang menjerat mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah. Meski demikian, hingga saat ini tidak ada pernyataan resmi dari pemerintah yang mengaitkan proses hukum tersebut dengan isu pergantian Kapolri.

Secara hukum, mekanisme pengangkatan maupun pemberhentian Kapolri diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam ketentuan tersebut, Presiden mengangkat dan memberhentikan Kapolri dengan persetujuan DPR. Prosesnya diawali



Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman, foto bersama Jaksa Agung ST Burhanuddin dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/7/2026). ist

dengan penyampaian surat presiden kepada DPR untuk selanjutnya dilakukan uji kelayakan dan kepatutan sebelum memperoleh persetujuan parlemen.

Karena itu, keberadaan surpres merupakan tahapan penting dalam proses pergantian Kapolri. Hingga Selasa (4/8/2026), DPR memastikan surat tersebut belum diterima.

Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo menjabat sebagai Kapolri sejak dilantik Presiden Joko Widodo pada 27 Januari 2021 menggantikan Jenderal Pol. Idham Azis. Alumni Akademi Kepolisian 1991 itu sebelumnya pernah menjabat Kabareskrim Polri, Kapolda Banten, Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam), serta ajudan Presiden Joko Widodo saat masih menjabat Wali Kota Surakarta. Selama memimpin Polri, ia mengusung konsep Presisi (Prediktif, Responsibilitas, Transparansi Berkeadilan) sebagai arah transformasi institusi.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi juga menyatakan Presiden Prabowo belum memiliki agenda melakukan reshuffle pada Agustus 2026.

"Reshuffle? Sementara belum ada," kata Prasetyo pada 30 Juli 2026.

Menurut Prasetyo, apabila dalam waktu dekat ada pelantikan pejabat, kemungkinan hanya untuk mengisi jabatan yang masih kosong akibat perubahan pejabat sebelumnya.

"Kalaupun misalnya ada, barangkali untuk mengisi kekosongan-kekosongan dari beberapa posisi yang

karena perubahan yang kemarin ditinggalkan oleh pejabat yang lama."

Saat ditanya apakah salah satunya Wakil Menteri Pertanian, Prasetyo menjawab, "Ya, contohnya seperti Wamentan."

Hingga Selasa malam, belum ada pengumuman resmi dari Istana Kepresidenan mengenai pergantian Kapolri maupun pengiriman surat presiden kepada DPR. Dengan demikian, isu pergantian Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo masih belum memasuki tahapan konstitusional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kepolisian.

Berikut naskah yang disusun ulang dengan gaya berita koran, lebih berimbang, tidak menghakimi, serta menegaskan bahwa penilaian tersebut merupakan pendapat pengamat, bukan sikap pemerintah.

Pengamat Masukkan Kapolri Layak Dievaluasi

Di tengah mencuatnya isu pergantian Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri), seorang pengamat politik turut menilai evaluasi terhadap pimpinan lembaga penegak hukum perlu dilakukan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kinerja pemerintahan.

Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, menilai Presiden Prabowo Subianto perlu mengevaluasi sejumlah pejabat di bidang ekonomi, politik, dan penegakan hukum. Penilaian itu didasarkan pada hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting

(SMRC) yang menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah di sejumlah sektor strategis belum optimal.

"Temuan itu menunjukkan, publik menilai kinerja menteri di bidang ekonomi, politik, dan hukum rendah. Hal ini memunculkan ketidakpuasan publik terhadap para menteri yang menangani tiga bidang tersebut," kata Jamiluddin.

Menurut Jamiluddin, evaluasi terhadap pejabat yang membidangi sektor ekonomi, politik, dan hukum penting dilakukan agar pemerintah dapat meningkatkan kepercayaan publik sekaligus memperbaiki efektivitas pelaksanaan program-program strategis.

Di sektor ekonomi, ia menilai evaluasi dapat diarahkan kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Perdagangan Budi Santoso, serta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia.

Khusus Bahlil, Jamiluddin menilai sejumlah kebijakannya kerap memunculkan polemik di ruang publik.

Sementara di bidang politik dan pemerintahan, Jamiluddin memasukkan nama Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, serta Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari sebagai pejabat yang menurutnya perlu dievaluasi.

Pada sektor penegakan hukum, Jamiluddin menyebut tiga pejabat, yakni Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Jaksa Agung ST Burhanuddin, dan Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo.

Meski demikian, Jamiluddin tidak menguraikan secara spesifik alasan penilaian terhadap masing-masing pejabat tersebut. Ia hanya menegaskan bahwa evaluasi secara menyeluruh diperlukan untuk memperbaiki kinerja pemerintahan di mata publik.

"Evaluasi total terhadap para pejabat di tiga bidang utama tersebut mendesak dilakukan guna memperbaiki kinerja pemerintahan secara menyeluruh di mata masyarakat," ujarnya. (wid,rls,kum/dya)

KPK PANGGIL ANAK ANWAR SADAD SEBAGAI SAKSI KASUS DANA HIBAH JATIM

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Muhammad Haykal Ismail Sadad, anak anggota DPR RI Anwar Sadad, Selasa (4/8/2026). Dia dijadikan saksi dalam penyidikan dugaan korupsi dana hibah kelompok masyarakat (pokmas) yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Timur periode 2019–2022. Sehari sebelumnya, Senin (3/8/2026), Anwar Sadad yang kini telah berstatus tersangka mangkir dari panggilan komisi antirasuah.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pemeriksaan dijadwalkan berlangsung pada Selasa (4/8/2026). Selain Haykal, penyidik juga memanggil seorang pihak swasta berinisial AHF sebagai saksi dalam perkara yang sama. "KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi-saksi dugaan korupsi dana hibah dari APBD Provinsi Jawa Timur atas nama MHI," kata Budi Prasetyo dalam keterangan tertulis.

Namun hingga sekitar pukul 13.20 WIB, keduanya belum memenuhi panggilan pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK.

Sehari sebelumnya, Senin (3/8), KPK juga telah memanggil Anwar Sadad yang kini telah berstatus tersangka. Namun politikus tersebut mangkir alias tidak menghadiri pemeriksaan.

Dalam perkembangan penyidikan, KPK telah menahan tiga tersangka, yakni Achmad Yahya, M. Fathullah, dan RA Wahid Rustan. Ketiganya merupakan pihak swasta yang diduga memberikan suap kepada Anwar Sadad saat masih menjabat anggota DPRD Jawa Timur periode 2019–2024. Kini, Anwar menjabat anggota DPR RI periode 2024–2029.

Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, Anwar Sadad hingga kini belum ditahan.

Awalnya KPK menetapkan 21 tersangka dalam perkara tersebut. Namun penyidikan terhadap mantan Ketua DPRD Jawa Timur Kusnadi dihentikan pada 16 Desember 2025, sehingga jumlah tersangka kini menjadi 20 orang.

Empat terdakwa dalam perkara ini telah lebih dahulu menjalani proses hukum hingga berkekuatan hukum tetap (inkracht), yakni HAS, anggota DPRD Jawa Timur periode 2024–2029 dari Kabupaten Gresik; JPP dari Kabupaten Blitar; SUK, mantan kepala desa di Tulungagung; serta WK, pihak swasta asal Tulungagung.

Diduga Atur Alokasi Hibah dan Minta Fee

KPK menduga perkara bermula ketika Anwar Sadad bersama pimpinan fraksi di DPRD Jawa Timur menentukan besaran alokasi dana hibah pokok pikiran (pokir) bagi masing-masing anggota dewan.



Anggota DPR RI periode 2024–2029 dari Partai Gerindra, Anwar Sadad

Dari skema tersebut, Anwar diduga memperoleh alokasi dana hibah sekitar Rp291,5 miliar sepanjang 2019–2022. Ia juga diduga mensyaratkan komitmen fee sebesar 15–20 persen kepada koordinator lapangan (korlap) atau anggota DPRD yang mengusulkan pergeseran alokasi dana hibah.

Untuk merealisasikan anggaran, para korlap diduga membentuk kelompok masyarakat (pokmas) atau menggunakan lembaga tertentu untuk mengajukan proposal hibah. Setelah dana cairkan, korlap diduga menyetorkan komitmen fee sebesar 20–25 persen kepada Anwar Sadad, baik secara langsung, melalui orang kepercayaannya berinisial BGS, maupun dengan membiayai kebutuhan pribadi Anwar.

Sementara itu, Achmad Yahya, M. Fathullah, dan RA Wahid Rustan diduga menyerahkan uang sedikitnya Rp6,9 miliar kepada Anwar melalui BGS sebagai imbalan untuk memperoleh alokasi dana hibah di wilayah masing-masing.

Temuan BPK Sejak 2021

Persoalan dana hibah Jawa Timur sebenarnya telah menjadi sorotan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Berdasarkan dokumen BPK Perwakilan Jawa Timur yang pernah diungkap Tempo, pada 2021 pemerintah provinsi merealisasikan belanja hibah sebesar Rp3,3 triliun.

Dana tersebut disalurkan melalui dua jalur, yakni usulan gubernur dan usulan DPRD. Untuk jalur DPRD, usulan berasal dari proposal masyarakat melalui pokok-pokok

pikiran (pokir).

BPK menemukan sejumlah persoalan, mulai dari daftar calon penerima hibah yang dimasukkan ke sistem e-budgeting tanpa evaluasi dan verifikasi memadai, proposal tanpa peta lokasi proyek, lokasi pekerjaan yang tidak akurat, hingga pekerjaan yang tidak sesuai peruntukan.

Anggota BPK saat itu, Achsanul Qosasi, menyatakan lembaganya telah berulang kali menyampaikan temuan terkait dana hibah yang disalurkan melalui DPRD Jawa Timur kepada kelompok masyarakat.

"Besarnya hibah yang mencapai 30 persen dari PAD (pendapatan asli daerah) menjadi sorotan BPK Perwakilan Jawa Timur," kata Achsanul.

Menanggapi temuan tersebut pada 2022, Anwar Sadad mengakui penyaluran dana hibah memiliki potensi penyimpangan.

"Potensi korupsi harus diakui secara jujur ada pada tiap kebijakan," ujar Anwar pada 16 Desember 2022.

Meski demikian, ia menilai mekanisme hibah diperlukan agar program pemerintah daerah dapat menjangkau masyarakat lebih luas. Menurutnya, secara normatif mekanisme hibah tidak bermasalah karena telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, tetapi ia mengakui masih terdapat berbagai persoalan dalam implementasinya.

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) LSM Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) mendesak KPK mengambil langkah tegas terhadap Anwar Sadad, apabila kembali tidak memenuhi panggilan penyidik. LIRA menilai



KLASTER 1 SUAP KUSNADI (Eks Ketua DPRD Jatim)

Penerima (1):

- Kusnadi – Eks Ketua DPRD Jatim 2019–2024. (Penyidikan gugur karena wafat akhir 2025).

Pemberi (5):

- Hasanuddin – Anggota DPRD Jatim 2024–2029. (Ditahan KPK).
- Jodi Pradana Putra – Swasta Blitar. (Ditahan).
- Sukar – Mantan Kades Tulungagung. (Ditahan).
- Wawan Kristiawan – Swasta Tulungagung. (Ditahan).
- A. Royan – Swasta Tulungagung. (Belum ditahan, sakit).



KLASTER 2 – SUAP ANWAR SADAD (Eks Wakil Ketua DPRD Jatim)

Penerima (2):

- Anwar Sadad – Anggota DPR RI, eks Wakil Ketua DPRD Jatim.
- Wahyudiono – Staf ahli/orang kepercayaan.

Pemberi (10):

- Moch Mahrus (Ali) – Anggota DPRD Jatim. (Ditahan 28 Juli 2026).
- Achmad Yahya – Swasta Pasuruan. (Ditahan).
- M. Fathullah – Swasta Pasuruan. (Ditahan).
- Ra Wahid Rustan – Swasta Bangkalan. (Ditahan).
- Mahhud – Eks Anggota DPRD Jatim.
- Fauzan Adima – Eks Wakil Ketua DPRD Sampang.
- Jon Junaidi – Eks Wakil Ketua DPRD Probolinggo.
- Ahmad Heriyadi – Swasta Sampang.
- Ahmad Affandy – Swasta Sampang.
- Abdul Motolib – Swasta Sampang.



KLASTER 3 – SUAP ACHMAD ISKANDAR (Eks Wakil Ketua DPRD Jatim)

Penerima (1):

- Achmad Iskandar – Eks Wakil Ketua DPRD Jatim.

Pemberi (2):

- Ahmad Jailani – Swasta
- Sumenep.Mashudi – Swasta Bangkalan.

ketidakhadiran tersangka tidak boleh dibiarkan berlarut karena dapat mencederai kredibilitas penegakan hukum.

Wakil Presiden DPP LSM LIRA, Samsudin, mengatakan KPK memiliki kewenangan untuk melakukan upaya paksa apabila seorang tersangka kembali mangkir tanpa alasan hukum yang sah.(gus,ist,kum/dya)

BMKG TETAPKAN PULAU JAWA ZONA MERAH KEKERINGAN METEOROLOGIS

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini kekeringan meteorologis untuk periode Dasarian I Agustus 2026 atau 1–10 Agustus 2026. Sejumlah kabupaten dan kota di Pulau Jawa masuk kategori awas atau zona merah, sementara BMKG juga mengungkapkan bahwa Juli 2026 menjadi bulan Juli terkering di Indonesia sejak pencatatan curah hujan nasional dimulai pada 1991.

Kondisi tersebut terjadi seiring semakin menguatnya fenomena El Nino dan Indian Ocean Dipole (IOD) positif yang menyebabkan curah hujan di berbagai wilayah Indonesia terus menurun. Hingga awal Agustus, BMKG mencatat sekitar 74 persen wilayah Indonesia telah memasuki musim kemarau. Sementara puncak musim kemarau diperkirakan berlangsung pada Juli hingga September 2026 dan diproyeksikan semakin kering karena El Nino diperkirakan bertahan hingga awal 2027.

Pelaksana Tugas Deputy Bidang Klimatologi BMKG, Fachri Radjab, mengatakan analisis BMKG menunjukkan Juli 2026 menjadi bulan Juli dengan curah hujan terendah dalam 35 tahun terakhir.

"Di bulan Juni, curah hujan rata-rata wilayah Indonesia berada pada peringkat kedelapan terkering sejak 1991. Namun pada Juli, ternyata Juli 2026 menjadi bulan Juli terkering peringkat pertama sejak 1991," kata Fachri dalam Dialog Nasional Kementerian PPN/Bappenas di Jakarta, Selasa (4/8/2026).

Ia menjelaskan kondisi tersebut dipengaruhi oleh El Nino yang telah mencapai kategori kuat dan berkembangnya IOD positif di Samudra Hindia. Kedua fenomena iklim itu sama-sama mengurangi curah hujan selama musim kemarau.

Menurutnya, El Nino bahkan berpotensi meningkat menjadi kategori sangat kuat dengan peluang sekitar 75 persen pada periode Agustus hingga Oktober 2026.

"Ini mungkin yang perlu menjadi antisipasi kita ketika dua fenomena ini aktif, baik di sisi timur maupun sisi barat Indonesia, dan sama-sama berpotensi mengurangi curah hujan selama periode musim kemarau ini," ujarnya.

Analisis BMKG menunjukkan hampir seluruh wilayah Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Nusa Tenggara Timur (NTT) mengalami curah hujan rendah hingga sangat rendah sepanjang Juli 2026. Kondisi serupa juga terjadi di Sumatra bagian selatan, Kalimantan bagian selatan, sebagian Sulawesi, Maluku, dan Papua, kecuali Papua Tengah dan Papua Pegunungan.

BMKG menjelaskan, kekeringan meteorologis merupakan kondisi ketika curah hujan berada di bawah normal akibat anomali cuaca dan



Foto udara sawah yang terdampak kekeringan di Kecamatan Cibarusah, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Jumat (31/7/2026). (antara)

iklim dalam periode tertentu. Kondisi ini ditandai dengan berkurangnya curah hujan, meningkatnya suhu udara, serta meningkatnya evapotranspirasi atau gabungan proses penguapan air dan transpirasi

tanaman.

Dalam peringatan dini Dasarian I Agustus 2026, BMKG membagi status kekeringan ke dalam tiga kategori, yakni waspada, siaga, dan awas. Kategori waspada menandakan curah

hujan mulai berada di bawah normal. Status siaga menunjukkan kekeringan mulai berdampak pada menurunnya cadangan air tanah. Sementara kategori awas menjadi tingkat tertinggi yang menunjukkan wilayah telah lama tidak diguyur hujan dan berisiko mengalami kekeringan parah. (tin,rls,ant/dya)

PERINGATAN DINI KEKERINGAN METEOROLOGIS BMKG

Status Wilayah Dasarian I Agustus 2026 (1–10 Agustus)

AWAS / ZONA MERAH

- Jawa Barat
- Jawa Tengah
- DI Yogyakarta
- Jawa Timur
- Bali
- NTB
- NTT

SIAGA (Oranye)

- Bangka Belitung
- Lampung
- Banten
- Jawa Barat
- Jawa Tengah
- DI Yogyakarta
- Jawa Timur
- Bali
- NTB
- NTT
- Kalimantan Tengah
- Kalimantan Selatan
- Sulawesi Utara
- Gorontalo
- Sulawesi Selatan
- Sulawesi Barat
- Sulawesi Tenggara
- Maluku Utara

WASPADA (Kuning)

- Bangka Belitung
- Bengkulu
- Lampung
- Banten
- DKI Jakarta
- Jawa Tengah
- Jawa Timur
- NTT
- Kalimantan Barat
- Kalimantan Tengah
- Kalimantan Timur
- Kalimantan Selatan
- Sulawesi Barat
- Sulawesi Tengah
- Sulawesi Selatan
- Sulawesi Tenggara
- Maluku
- Maluku Utara
- Papua Barat
- Papua Barat Daya

Sumber: BMKG – Peringatan Dini Kekeringan Meteorologis Dasarian I Agustus 2026.



membuktikan bahwa paradigma yang menempatkan ekosistem penting sebagai objek eksploitasi turut berkontribusi pada situasi yang kita hadapi hari ini," katanya. (med,ist/dya)

WALHI: Parah Akibat Alih Fungsi Lahan

WAHANA Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) menilai meluasnya kekeringan di berbagai daerah bukan semata-mata dipengaruhi fenomena iklim seperti El Nino. Kondisi tersebut juga dipicu oleh kerusakan lingkungan akibat alih fungsi lahan serta menyusutnya kawasan hutan yang berperan menjaga ketersediaan air.

Pengkampanye Pangan dan Ekosistem Esensial Eksekutif Nasional WALHI Musdhalifah mengatakan, dampak El Nino yang memicu kekeringan berkepanjangan tidak bisa dilepaskan dari tata kelola lingkungan yang dinilai mengabaikan fungsi ekologis kawasan-kawasan penting.

"Situasi El Nino hari ini atau kekeringan berkepanjangan tentu tidak terlepas dari bagaimana salah urus negara dalam melihat kawasan ekosistem penting sebagai penyangga kehidupan yang memiliki fungsi ekologis," ujar Musdhalifah dikutip Selasa (4/8).

Menurutnya, berkurangnya

tutupan hutan, rusaknya daerah resapan air, serta pengelolaan lahan yang tidak memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan membuat dampak musim kering semakin parah.

WALHI mencatat Indonesia masih memiliki sekitar 103 juta hektare tutupan hutan yang mencakup berbagai ekosistem penting, seperti hutan rawa gambut, mangrove, pegunungan, dan kawasan karst. Namun, sekitar 26,5 juta hektare kawasan berhutan berada di dalam wilayah izin industri ekstraktif dan proyek transisi energi.

Dari luasan tersebut, sekitar 21,1 juta hektare berada di bawah izin Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH), 4,7 juta hektare berada di wilayah izin usaha pertambangan, serta sekitar 700 ribu hektare berada di bawah hak guna usaha perkebunan monokultur.

"Alih fungsi lahan itu berkontribusi pada kerusakan ekosistem yang memperbesar dampak ketika El Niño terjadi. Ini

Masih Rusak, Pemkab Belum Mau Terima Stadion Kanjuruhan

MALANG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang belum bersedia menerima serah terima fisik Stadion Kanjuruhan dari pemerintah pusat. Alasannya, masih ditemukan sejumlah kerusakan. Apalagi menurut perhitungan kasar, dibutuhkan Rp4 miliar hingga Rp6 miliar untuk memperbaiki berbagai kerusakan tersebut.

Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Malang, Zulham Mubarrak, mengatakan kewenangan perbaikan hingga saat ini masih berada di tangan Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Hal itu karena Stadion Kanjuruhan baru berstatus Berita Acara Serah Terima Operasional (BASTO), sehingga hanya dapat digunakan untuk kegiatan, tetapi belum diserahkan sebagai aset kepada Pemkab Malang.

"Hitungan kami minimal masih butuh Rp4 sampai Rp5 miliar, bahkan bisa Rp6 miliar untuk perbaikan-perbaikan," kata Zulham, Selasa (4/8/2026).

Menurut dia, status BASTO membuat pemerintah daerah belum memiliki kewenangan melakukan renovasi maupun perubahan fisik pada stadion. Karena itu, setiap temuan kerusakan dilaporkan kepada Kementerian PU sebagai pihak yang masih bertanggung jawab atas bangunan tersebut.

"Stadion ini sudah BASTO, jadi boleh dipakai, tetapi tidak boleh direnovasi, diubah, atau dibangun apa pun. Pemkab terkendala karena Stadion Kanjuruhan masih menjadi tanggungan Kementerian PU dan belum diserahkan," ujarnya.

Zulham menegaskan pemerintah pusat harus menuntaskan perbaikan seluruh kerusakan sebelum proses serah terima fisik dilakukan. Menurutnya, Pemkab Malang tidak semestinya menerima aset yang kondisinya belum sepenuhnya layak.

"Saya kira juga Pemkab tidak berani menerima proses serah terima bangunan yang masih rusak begitu," katanya.

Berdasarkan hasil inspeksi lapangan DPRD Kabupaten Malang, sejumlah kerusakan masih ditemukan di berbagai bagian stadion. Di antaranya kebocoran pada tribun akibat rusaknya lapisan waterproofing, plafon yang rusak, genangan air di beberapa titik, saluran air yang tersumbat di Gate 15, kerusakan pengaspalan di Gate 8, hingga indikasi gangguan pada instalasi kabel.

Menurut Zulham, persoalan tersebut mencakup tiga kelompok pekerjaan, yakni struktur, arsitektur, serta mekanikal, elektrik, dan plumbing (MEP).

"Hampir semua tribun mengalami kerusakan pada waterproofing," ujarnya.

Ia mengingatkan, jika tidak segera



Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Malang, Zulham Mubarrak, meninjau kondisi Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang. (foto: DPRD Kab. Malang)

diperbaiki, kerusakan berpotensi semakin parah. Kebocoran dapat merembes ke bagian bawah tribun dan mempercepat kerusakan bangunan, sementara sistem drainase yang belum optimal berisiko menimbulkan genangan hingga banjir saat hujan. (santi/dya)

Pemkot Malang Siap Impor 100 Sapi Australia, Tekan Harga Daging



Ilustrasi: Sapi-sapi impor yang didatangkan dari Australia di Rumah Potong Hewan (RPH) Perumda Tunas Kota Malang. (foto: Dispangtan Kota Malang)

MALANG – Pemerintah Kota (Pemkot) Malang menyiapkan impor 100 ekor sapi hidup dari Australia untuk menjaga pasokan dan menekan kenaikan harga daging sapi yang terjadi akibat minimnya stok sapi lokal. Impor dilakukan secara bertahap melalui Perumda Tugu Aneka Usaha (Tunas) bekerja sama dengan perusahaan importir.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (Dispangtan) Kota Malang yang juga Pelaksana Tugas

(Plt) Direktur Utama Perumda Tugu Aneka Usaha (Tunas), Slamet Husnan, mengatakan pasokan sapi lokal menurun di tengah meningkatnya permintaan.

"Memang sapi lokal ketersediaannya kurang. Karena dibarengi aktivitas sekolah, kuliah yang mulai berjalan, termasuk dapur SPPG juga beroperasi. Sementara ketersediaan sapi lokal relatif sedikit, ditambah harga sapi impor juga relatif mahal," kata Slamet saat dikonfirmasi, Selasa (4/8/2026).

Menurutnya, dari target 100 ekor sapi impor, sebanyak 35 ekor telah tiba di Rumah Potong Hewan (RPH) Tunas Kota Malang. Pasokan berikutnya akan didatangkan sesuai kebutuhan pasar.

"Kalau minggu ini habis, akan ditambah lagi minggu depan," ujarnya.

Slamet menjelaskan, Perumda Tunas tidak mengimpor sapi secara langsung. Pengadaan dilakukan melalui perusahaan yang telah mengantongi izin impor sapi hidup

dari Australia.

Setibanya di RPH Tunas, sapi-sapi tersebut dijual kepada para jagal untuk dipotong sebelum dipasarkan ke berbagai pasar tradisional di Kota Malang.

"Datangnya di RPH Tunas, nanti dibeli jagal-jagal. Jagal yang memotong, kemudian menjual dagingnya ke pasar-pasar. Mekanismenya memang seperti itu," katanya.

Selain melalui Perumda Tunas, sejumlah jagal juga mendatangkan sapi impor secara mandiri. Berdasarkan data Dispangtan, sedikitnya 25 ekor sapi impor telah masuk melalui jalur tersebut.

Minimnya pasokan sapi lokal ikut mendorong kenaikan harga daging sapi di pasar tradisional. Berdasarkan pemantauan Dispangtan, harga daging sapi di Pasar Bunul mencapai sekitar Rp148 ribu per kilogram, sedangkan di Pasar Klojen untuk daging kualitas baik telah menyentuh Rp160 ribu per kilogram.

Slamet menilai perbedaan harga antarpasar merupakan hal yang wajar.

"Untuk Pasar Klojen dan Pasar Oro-oro Dowo memang biasanya harga-

harganya lebih mahal dibanding pasar lain," ujarnya.

Meski impor mulai dilakukan, pemerintah mengakui harga daging sapi belum sepenuhnya stabil. Karena itu, Pemkot Malang masih membuka peluang menambah impor apabila pasokan dinilai belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.

"Nanti kami berhitung lagi kapan harus mendatangkan sapi impor berikutnya. Kami juga tetap mencari sapi lokal. Karena stok sapi lokal sepertinya habis saat Hari Raya Iduladha. Ini memang mekanisme tahunan, kadang harga naik, kadang turun," kata Slamet.

Ia menambahkan, keputusan menambah impor akan didasarkan pada kebutuhan riil di lapangan melalui koordinasi dengan paguyuban jagal. Di sisi lain, Perumda Tunas juga harus menjaga keseimbangan antara fungsi pelayanan publik dan keberlanjutan usaha.

"Jangan sampai Perumda Tunas juga terlalu rugi, karena fungsinya selain mencari keuntungan, juga melakukan pengendalian harga dan menjaga pasokan," tuturnya. (santi/dya)

TARIF TRUMP DIGUGAT 25 NEGARA BAGIAN

Kebijakan tarif impor Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump kembali menghadapi gugatan hukum. Kali ini, perlawanan datang dari dalam negeri. Sebanyak 25 negara bagian menggugat pemerintahan Trump ke Pengadilan Perdagangan Internasional AS (U.S. Court of International Trade) atas kebijakan tarif baru terhadap barang impor dari 60 negara mitra dagang, termasuk Indonesia. Gugatan tersebut meminta pengadilan menghentikan pemberlakuan tarif sebesar 10 persen hingga 12,5 persen dan menyatakan kebijakan itu melanggar hukum. Juga memerintahkan pemerintah mengembalikan seluruh bea masuk yang telah dibayarkan para importir.

Langkah hukum itu menjadi tantangan terbaru bagi agenda perdagangan Trump. Para penggugat menilai pemerintahan Trump berupaya menghidupkan kembali kebijakan tarif yang sebelumnya telah dibatalkan Mahkamah Agung AS, tetapi kali ini menggunakan dasar hukum berbeda.

Dalam gugatan itu, koalisi 25 negara bagian berpendapat pemerintahan Trump memanfaatkan Pasal 301 Undang-Undang Perdagangan 1974 (Section 301 Trade Act) sebagai dasar untuk memberlakukan kembali tarif impor global dengan dalih memberantas praktik kerja paksa di negara-negara mitra dagang.

Pada hal, menurut mereka, Pasal 301 hanya dapat digunakan setelah pemerintah AS menyelesaikan penyelidikan mengenai praktik perdagangan yang tidak adil atau dugaan kerja paksa. Setelah investigasi tersebut selesai, tarif baru dapat diterapkan kepada negara tertentu dengan besaran yang disesuaikan dengan tingkat pelanggaran yang ditemukan.

Namun, para penggugat menilai proses tersebut tidak dilakukan sebagaimana mestinya. Pemerintah AS disebut hanya membutuhkan waktu sekitar dua setengah bulan untuk menyelesaikan investigasi terhadap 60 negara, kemudian mengelompokkannya ke dalam empat kategori tarif dengan selisih hanya sekitar 2,5 poin persentase antara dua kelompok tarif utama.

Selain itu, pemerintahan Trump dinilai tidak mampu menunjukkan hubungan yang jelas antara tarif yang dikenakan dengan tingkat dugaan praktik kerja paksa di masing-masing negara.

"Tidak ada kesesuaian rasional antara masalah dugaan kerja paksa dalam rantai pasokan internasional dan tarif global menyeluruh yang diberlakukan oleh USTR."

Koalisi negara bagian berpendapat kebijakan tersebut pada dasarnya hanya menghidupkan kembali tarif global yang sebelumnya telah dibatalkan Mahkamah Agung AS.

Jaksa Agung Negara Bagian New York, Letitia James, menuding pemerintahan Trump kembali mencoba membebaskan biaya kepada masyarakat melalui kebijakan yang tidak memiliki dasar hukum memadai.

"Setelah kalah di Mahkamah Agung,



Sebuah kapal kargo yang penuh dengan kontainer pengiriman terlihat di Pelabuhan Oakland, California. (ist)

pemerintah sekali lagi mencoba menaikkan pajak secara ilegal kepada keluarga dan bisnis dengan putaran tarif baru."

Gedung Putih Bela Trump

Pemerintahan Trump menolak seluruh tuduhan dalam gugatan tersebut.

Juru Bicara Gedung Putih Kush Desai menegaskan pemerintah memiliki dasar hukum untuk menggunakan Pasal 301 guna mengatasi praktik perdagangan yang dinilai merugikan Amerika Serikat.

"Amerika Serikat menggunakan wewenang hukumnya untuk menghilangkan tindakan, kebijakan, dan praktik yang tidak masuk akal yang membebani perdagangan AS."

Menurut Desai, kegagalan sejumlah negara memberlakukan serta menegakkan larangan terhadap barang hasil kerja paksa telah merugikan pekerja Amerika.

"Kegagalan negara asing untuk memberlakukan dan secara efektif menegakkan larangan impor atas barang-barang yang diproduksi dengan kerja paksa merupakan tindakan yang tidak masuk akal dan membebani perdagangan AS, termasuk pekerja Amerika, dan harus ditangani."

Karena itu, Gedung Putih menilai tarif baru tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

"Tarif Pasal 301 telah terbukti sebagai alat yang sah secara hukum sejak masa jabatan pertama presiden, dan tetap demikian hingga sekarang."

Indonesia Terdampak

Indonesia menjadi salah satu dari 60 negara yang dikenai tarif baru tersebut. Pemerintah AS menilai

negara-negara tersebut belum secara efektif mencegah masuknya barang yang diproduksi melalui praktik kerja paksa ke dalam rantai pasok perdagangan menuju Amerika Serikat.

Dengan dasar itu, produk dari Indonesia dikenai tarif sebesar 10 persen bersama sejumlah negara lainnya.

Kebijakan tersebut berpotensi menambah biaya bagi importir Amerika yang membeli produk dari Indonesia, sekaligus memengaruhi daya saing ekspor Indonesia apabila tarif tetap diberlakukan dalam jangka panjang.

Berita ini sebaiknya dipisahkan dari berita gugatan hukum karena memiliki angle berbeda. Berita pertama berfokus pada gugatan 25 negara bagian terhadap kebijakan Trump, sedangkan berita ini berfokus pada kebijakan tarif baru yang resmi diberlakukan dan dampaknya terhadap Indonesia.

Diketahui Trump resmi memberlakukan tarif impor baru terhadap produk dari 60 negara mitra dagang, termasuk Indonesia, setelah skema tarif sementara yang berlaku selama lima bulan berakhir.

Mulai Jumat (24/7), barang asal Indonesia dikenai tarif impor sebesar 10 persen, sementara sejumlah negara lain dikenai tarif hingga 12,5 persen. Kebijakan tersebut diterapkan dengan alasan negara-negara sasaran dinilai belum efektif mencegah masuknya produk yang dibuat menggunakan tenaga kerja paksa ke dalam rantai pasok perdagangan menuju Amerika Serikat.

Mengutip Reuters, kebijakan baru itu diumumkan melalui Federal

BESARAN TARIF TRUMP SAAT INI

- **TARIF BASELINE 10%:**
Dikenakan pada komoditas impor dari sebagian besar mitra dagang utama, termasuk Indonesia, Argentina, Bangladesh, Kamboja, Kanada, Ekuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, India, Yordania, Malaysia, Meksiko, Pakistan, Sri Lanka, Trinidad & Tobago, serta Inggris.
- **TARIF KOMBINASI TOTAL 10% (COMPOUND DUTY):**
Berlaku bagi Uni Eropa dan Taiwan. Jika tarif standar awalnya di bawah 10%, maka nilainya akan digabung hingga mencapai total batas atas 10%.
- **TARIF KOMBINASI TOTAL 12,5%:**
Berlaku bagi Jepang, Korea Selatan, dan Swiss. Jika tarif dasar di bawah 12,5%, bea masuk akan disesuaikan menjadi total akumulatif 12,5%.
- **Tarif Tambahan Khusus 5%:**
Diberlakukan untuk China dan Vietnam, yang ditumpuk di atas beban tarif sektoral yang sudah berjalan sebelumnya.



Register pada Kamis (23/7) dan mulai berlaku tepat ketika tarif global sementara sebesar 10 persen yang diberlakukan selama 150 hari berakhir.

Dalam keputusan tersebut, Amerika Serikat mengenakan tarif 10 persen terhadap produk dari Argentina, Bangladesh, Inggris, Kamboja, Kanada, Ekuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, India, Indonesia, Yordania, Malaysia, Meksiko, Pakistan, Sri Lanka, serta Trinidad dan Tobago.

Sementara itu, Uni Eropa, Jepang, Korea Selatan, Taiwan, dan Swiss dikenai tarif yang jika digabungkan dengan tarif most-favored nation (MFN) menjadi sebesar 10 persen atau 12,5 persen. Adapun 38 negara lainnya, termasuk China, dikenai tarif sebesar 12,5 persen. (gus,rtr,ist/dya)

Jangan Terkecoh Minuman Kemasan Berlabel 'Jus Buah'

Pagi hari sering kali dimulai dengan rutinitas sederhana. Orang tua menyiapkan bekal sekolah, sementara anak memilih minuman favoritnya. Tak sedikit yang menjatuhkan pilihan pada jus buah kemasan. Alasannya sederhana: praktis, rasanya disukai anak, dan pada kemasannya terpampang gambar buah segar lengkap dengan klaim kaya vitamin.

Sekilas memang tampak sehat. Namun, di balik rasa manis dan citra "alami", para ahli mengingatkan bahwa konsumsi jus buah kemasan secara berlebihan dapat membawa dampak kesehatan jangka panjang.

Sebuah penelitian selama 25 tahun yang dipublikasikan dalam jurnal *Circulation* milik American Heart Association (AHA) menemukan bahwa kebiasaan mengonsumsi minuman manis sejak masa kanak-kanak berkaitan dengan meningkatnya risiko hipertensi saat dewasa. Penelitian yang melibatkan lebih dari 25.000 partisipan ini dipimpin peneliti dari Harvard T.H. Chan School of Public Health dan University of Toronto.

Hasil penelitian menunjukkan, anak yang terbiasa mengonsumsi dua porsi atau lebih minuman berpemanis setiap hari memiliki risiko hipertensi 52 persen lebih tinggi dibanding mereka yang jarang mengonsumsinya. Bahkan konsumsi jus buah kemasan sebanyak 1,5 porsi atau lebih per hari dikaitkan dengan peningkatan risiko hipertensi hingga 35 persen.

Peneliti utama, Prof. Vasanti Malik, menegaskan bahwa pola makan pada masa kanak-kanak meninggalkan jejak kesehatan hingga puluhan tahun kemudian. Yang menarik,

peningkatan risiko tersebut tetap terlihat meski responden memiliki pola makan yang relatif baik dan rutin berolahraga.

Jus Kemasan Beda dengan Buah Utuh

Banyak orang tua menganggap jus buah kemasan sama sehatnya dengan buah segar. Padahal, keduanya memiliki perbedaan yang cukup besar.

Buah utuh mengandung serat alami yang membantu memperlambat penyerapan gula sehingga kadar gula darah lebih stabil.

Saat buah diolah menjadi jus, terutama jus kemasan, sebagian besar serat hilang. Tak jarang produsen juga menambahkan gula, sirup jagung, atau pemanis lain agar rasanya lebih disukai konsumen.

Akibatnya, anak dapat mengonsumsi gula dalam jumlah besar tanpa merasa kenyang.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) bahkan memasukkan gula yang berasal dari jus buah ke dalam kategori *free sugars* atau gula bebas. WHO menganjurkan konsumsi gula bebas dibatasi kurang dari 10 persen dari total kebutuhan energi harian, bahkan idealnya di bawah lima persen untuk

memperoleh manfaat kesehatan yang lebih besar.

Sementara itu, American Academy of Pediatrics (AAP) menegaskan bahwa anak di bawah usia satu tahun tidak dianjurkan mengonsumsi jus buah sama sekali. Untuk anak yang lebih besar, jumlahnya pun perlu dibatasi sesuai usia karena buah utuh tetap menjadi pilihan yang lebih baik.

Hipertensi Berawal dari Kecil

Tekanan darah tinggi selama ini identik dengan orang lanjut usia. Faktanya, kasus hipertensi kini semakin banyak ditemukan pada remaja bahkan anak-anak.

Asupan gula berlebih dapat memicu kenaikan berat badan, resistensi insulin, hingga gangguan metabolisme yang pada akhirnya meningkatkan tekanan darah. Kebiasaan ini jika berlangsung bertahun-tahun akan memperbesar risiko penyakit jantung, stroke, dan gangguan ginjal ketika memasuki usia dewasa.

Yang perlu diingat, efek tersebut tidak muncul dalam semalam. Ia terbentuk perlahan melalui kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari. Kabar baiknya, perubahan sederhana dapat

memberikan dampak besar. Air putih tetap menjadi minuman terbaik untuk anak. Jika ingin memberikan jus, buatlah sendiri di rumah tanpa tambahan gula dan batasi porsinya. Lebih baik lagi, biasakan anak mengonsumsi buah dalam bentuk utuh agar kebutuhan seratnya terpenuhi.

Orang tua perlu lebih cermat dan kritis saat membaca label kemasan pada produk makanan maupun minuman anak. Klaim pemasaran seperti "mengandung buah asli", "tinggi vitamin C", atau "tanpa pewarna sintesis" sering kali menciptakan kesan seolah produk tersebut sepenuhnya sehat. Padahal, label-label menarik ini tidak selalu berarti produk tersebut bebas dari gula tambahan atau pemanis buatan. Tidak sedikit minuman atau camilan kemasan yang berlabel sehat justru menyimpan kandungan gula harian yang jauh melebihi batas aman untuk anak-anak.

Anak-anak adalah peniru terbaik, dan mereka belajar terutama dari apa yang tersedia di sekitar mereka setiap hari. Lingkungan rumah memegang peranan kunci dalam membentuk pola makan mereka hingga dewasa kelak. Ketika kulkas dan meja makan lebih sering diisi oleh air putih, susu tanpa gula berlebih, serta potongan buah segar dibanding minuman bersoda atau teh kemasan manis, kebiasaan tersebut perlahan terpatrit sebagai bagian alami dari gaya hidup mereka. Selain itu, mengurangi paparan gula berlebih sejak dini sangat membantu membiasakan indra pengecap anak untuk mengapresiasi rasa manis alami dari makanan utuh (*farist/dya*)



Ukur Kecerdasan Primata di Alam Liar, Monyet Kini Ikut Pakai AI



Kecerdasan buatan (AI) kembali menunjukkan manfaat di luar dunia industri dan kehidupan manusia. Kali ini, teknologi tersebut dimanfaatkan untuk membantu ilmuwan mempelajari kecerdasan monyet liar tanpa harus memindahkannya ke laboratorium.

Tim peneliti dari Emory University dan Georgia Institute of Technology mengembangkan sistem bernama CapuchinAI, perangkat berbasis AI yang mampu mengenali identitas monyet capuchin sekaligus

memberikan serangkaian tes kognitif secara otomatis di habitat aslinya. Hasil penelitian ini telah dipublikasikan dalam The American Journal of Primatology.

Inovasi tersebut dinilai menjadi terobosan baru dalam penelitian perilaku satwa liar. Selama ini, pengujian kemampuan kognitif hewan lebih banyak dilakukan di laboratorium karena lingkungan yang lebih mudah dikendalikan. Namun, kondisi tersebut kerap memunculkan pertanyaan apakah perilaku hewan di laboratorium benar-benar

mencerminkan perilaku alaminya. Mengenali Monyet Secara Otomatis CapuchinAI terdiri atas komputer berukuran kecil yang terhubung dengan kamera, layar sentuh, serta dispenser makanan.

Saat seekor monyet capuchin mendekati perangkat, sistem AI akan mengenali identitas individu berdasarkan foto dan rekaman video yang telah dipelajari sebelumnya. Setelah itu, layar sentuh akan menampilkan tugas sederhana untuk menguji kemampuan berpikir monyet.

Jika berhasil menyelesaikan tantangan, perangkat secara otomatis mengeluarkan hadiah berupa makanan sebagai bentuk penguatan positif (positive reinforcement). Pendekatan ini memungkinkan ilmuwan mengumpulkan data perilaku dalam kondisi yang jauh lebih alami dibandingkan pengamatan di laboratorium.

Akurasi Capai 97 Persen

Dalam uji lapangan di Taboga Forest Reserve, Kosta Rika, sistem tersebut menunjukkan hasil yang menjanjikan. Berdasarkan laporan yang dikutip The New York Times, CapuchinAI mampu mengenali individu monyet capuchin dengan tingkat akurasi mencapai 97 persen setelah dilatih menggunakan kumpulan foto dan video.

Peneliti juga mengamati bahwa monyet liar relatif cepat memahami hubungan antara menyentuh layar dengan memperoleh hadiah makanan. Hal ini menunjukkan primata mampu beradaptasi dengan antarmuka digital sederhana tanpa memerlukan pelatihan intensif.

Peneliti utama, Federico Sanchez Vargas, mengatakan teknologi tersebut membuka peluang baru dalam memahami kemampuan berpikir setiap individu satwa liar berdasarkan data yang dikumpulkan secara berkelanjutan. "Metode AI kami memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam terhadap setiap hewan yang telah diamati di lapangan. Kini kami dapat melakukan pengujian kognitif secara langsung kepada mereka," ujar Vargas. (far,ist/dya)



HARIAN
LENTERA
Inspirasi Perubahan **TODAY**

HARIAN "LENTERA TODAY"
PIMPINAN PERUSAHAAN TARMUJI TALMACSI
OMBUDSMAN SUKARJITO (ID Sertifikasi 14319)
PENANGGUNG JAWAB ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
PIMPINAN REDAKSI ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
REDAKTUR PELAKSANA AGUSTINA WIDYAWATI (ID Sertifikasi 2567)
REDAKTUR LUTFIYU HANDI, ARIEF SUKAPUTRA, MUHIBUDIN KAMALI

KORAN DIGITAL LENTERA TODAY
Terbit Senin - Jumat (12 Halaman)
download edisi digital pada web
www.lenteratoday.com
VERIFIKASI FAKTUAL DEWAN PERS
803/DP-Verifikasi/K/X/2021



MEDIA TERVERIFIKASI

BIRO: SURABAYA: YOLANDA APRILLIA PRADITHA, AMANAH NUR ASIAH, JOKO PRASETYO | **SIDOARJO:** TEGUH A | **GRESIK:** ASEPTA YOGA P. (SERTIFIKASI WARTAWAN UTAMA) | **MOJOKERTO:** NUR HIDAYAH | **LAMONGAN:** L HANDI | **BLITAR:** ARIEF SUKAPUTRA | **KEDIRI:** AIS | **JOMBANG:** SUTONO | **PASURUAN-PROBOLINGGO-PONOROGO:** IMAN SANTOSO | **BONDOWOSO- SITUBONDO-LUMAJANG-JEMBER-BANYUWANGI:** PURCAHYONO JULIATMOKO | **MADIUN:** WIWIET EKO PRASETYO (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA) | **MALANG RAYA:** SANTI WAHYU SANIA (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA), ISKANDAR Z. | **TRENGGALEK:** HERLAMBAH | **MADURA RAYA:** SAHLAN KURNIAWAN | **NGAWI:** DIMAS RIDHO SURYO BASKORO | **DKI JAKARTA:** FUAD HASSAN | **LOMBOK BARAT:** MUHAYYAN | **PALANGKA RAYA:** NOVITA MASNIARI

PENASEHAT HUKUM DR. NURIYANTO A. DAIM, SH, MH | **MARKETING COMMUNICATION** JOKO PRASETYO UTOMO, ISKANDAR ZULKARNAIN | **SEKERTARIS** FITRIYANTI SUTAN, FARADITA NUR FADHILA
DESAIN GRAFIS PAULUS IVAN, FADHILA | **ALAMAT REDAKSI** JL RUNGKUT ASRI UTARA VI/26, JL TENGGILIS TENGAH 4 | **TELP** 03187854491 | **PENERBIT** PT MEDIA HEBAT INSPIRASI INDONESIA | **ALAMAT PERCETAKAN** SMILE GRAFIKA JL. RAYA KALIRUNGKUT 42 SURABAYA | **TELP IKLAN** 031-87854491 | **NIB** 91205006801134 | **HARGA IKLAN** RP 25.000 MM/KOLOM

Wartawan Lentera Today dalam setiap bertugas dilengkapi dengan tanda pengenal wartawan/kartu pers yang dikeluarkan perusahaan secara sah. Nama pemegang tanda pengenal wartawan/kartu pers Lentera Today tercantum di Box Redaksi. Siapa pun yang mengaku/mengatasnamakan Lentera Today, tanpa bisa menunjukkan surat/kartu tanda pengenal atau namanya tidak tercantum dalam Kotak Redaksi, agar ditolak/ dikonfirmasi/dilaporkan ke manajemen redaksi/perusahaan atau melalui nomor telepon yang tertera di Kotak Redaksi. Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, setiap wartawan Lentera Today dilarang menerima dan/atau meminta apa pun dengan alasan apa pun.

Tak Lagi K-Beauty, Kini Giliran Brand Kecantikan Filipina Mendunia

Dominasi K-Beauty di industri kecantikan global mulai mendapat penantang baru dari Asia Tenggara. Sejumlah merek kosmetik asal Filipina kini mencuri perhatian pasar internasional berkat produk yang diklaim tahan terhadap cuaca panas dan lembap, sekaligus menawarkan pilihan warna yang lebih beragam untuk berbagai warna kulit.

Popularitasnya tidak lagi hanya tumbuh di media sosial. Berbagai jenama kecantikan Filipina mulai masuk ke pasar internasional, termasuk Uni Emirat Arab (UEA), seiring meningkatnya permintaan terhadap produk yang sesuai dengan iklim tropis dan kebutuhan konsumen multikultural.

Fenomena ini turut disoroti Vogue Arabia, yang menyebut produk kecantikan Filipina hadir dengan pendekatan berbeda dibanding tren glass skin ala Korea Selatan. Alih-alih mengejar tampilan kulit yang sangat berkilau, banyak merek Filipina mengembangkan formula yang mampu bertahan di suhu tinggi dan tingkat kelembapan ekstrem. Keuntungan utama kosmetik

Filipina justru berasal dari kondisi geografis negaranya.

Sebagai negara tropis dengan kelembapan udara tinggi sepanjang tahun, produk makeup dikembangkan agar tidak mudah luntur akibat keringat, lebih tahan minyak, dan tetap nyaman dipakai dalam aktivitas sehari-hari.

Karakter tersebut dinilai relevan dengan kebutuhan konsumen di kawasan beriklim panas seperti Asia Tenggara maupun Timur Tengah.

Menurut sejumlah pengamat industri kecantikan, keberhasilan kosmetik Filipina didorong oleh beberapa faktor:

Formula yang dirancang untuk cuaca panas dan lembap.

Pilihan warna complexion yang lebih inklusif. Produk multifungsi yang praktis digunakan. Harga relatif lebih terjangkau dibanding banyak merek premium global. Promosi yang kuat melalui TikTok dan media sosial.

Strategi tersebut membuat merek lokal Filipina mampu bersaing di pasar internasional tanpa harus mengandalkan citra mewah seperti banyak brand kosmetik global.

Tak hanya itu, industri kecantikan Filipina juga berkembang pesat. Nilai pasarnya diperkirakan mencapai US\$1,9 miliar hingga US\$4,7 miliar, bergantung pada metode perhitungan berbagai lembaga riset. Besarnya potensi pasar itu bahkan mendorong Vogue meluncurkan edisi khusus Filipina pada 2025, yang menjadi edisi pertama mereka di Asia Tenggara. Beberapa brand pun mulai digandrungi.

Sunnies Face

Nama ini menjadi salah satu pelopor kosmetik modern Filipina. Produk andalannya, Fluffmatte Lipstick, sempat terjual habis hanya dalam 10 menit saat pertama diluncurkan pada 2018. Lipstick matte tersebut kemudian memenangkan penghargaan industri kecantikan di Amerika Serikat pada 2022 dan pernah digunakan sejumlah figur publik internasional, termasuk Rosie Huntington-Whiteley.

Issy & Co.

Didirikan pada 2019, Issy & Co. dikenal berkat pilihan warna foundation yang jauh lebih beragam dibanding rata-rata produk di pasaran. Produk Active Foundation hadir dengan 27 pilihan warna sehingga dinilai lebih inklusif bagi berbagai warna kulit.

GRWM Cosmetics

Didirikan oleh kreator konten Mae Layug, GRWM Cosmetics populer lewat Radiance Tint, produk multifungsi yang menggabungkan concealer, corrector, dan brightener dalam satu kemasan. Produk ini banyak dibahas di TikTok karena dianggap mampu menggantikan penggunaan concealer konvensional secara lebih praktis dan efisien. Formula ringannya yang mudah di-blend tidak hanya memberikan cakupan (coverage) yang natural untuk menyamarkan noda hitam dan lingkaran hitam mata, tetapi juga memberikan efek pencerah seketika

tanpa terasa berat di kulit. Tak heran jika produk ini menjadi salah satu item wajib dalam rutinitas riasan sehari-hari bagi para pencinta keindahan (beauty enthusiasts).

Happy Skin

Happy Skin mengandalkan kemasan yang menarik serta formula yang diproduksi di Korea Selatan, Jepang, dan Taiwan.

Salah satu produk yang banyak mendapat ulasan positif adalah eyeshadow yang diklaim memiliki daya tahan tinggi sepanjang hari.

Colourette

Produk andalannya, Colourtint, dapat digunakan untuk bibir, pipi, maupun kelopak mata. Konsep produk multifungsi ini sejalan dengan tren makeup praktis yang semakin diminati konsumen muda.

Vice Cosmetics

Vice Cosmetics mengusung slogan "Ganda for All", yang menekankan bahwa kecantikan dapat dinikmati siapa saja tanpa memandang gender maupun warna kulit. Foundation mereka dikenal memiliki hasil akhir yang mampu mengontrol minyak sekaligus memberi efek blur pada kulit. (farist/dya)



Perlawanan Sang ...dari Hal 1

KASUS HUKUM FEBRIE ADRIANSYAH

Pokok Perkara

- Dugaan korupsi, suap, pemerasan, dan gratifikasi.
- Berkembang menjadi dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Tiga Perkara yang Disorot

- Korupsi PT Asabri.
- Dugaan korupsi tata kelola dan pasokan batu bara PLN.
- Dugaan korupsi di PT Krakatau Steel.

Pasal yang Disangkakan

- UU Tipikor: Pasal 12 huruf b dan Pasal 12B.
- UU TPPU: Pasal 3 dan Pasal 4.Tambahan:
- Pasal 607 ayat (1) huruf a dan b KUHP.

Tiga Tersangka

- Febrie Adriansyah (mantan Jampidsus Kejaksaan).
- Don Ritto.
- Nurman Herin (NH).

Status Febrie

- Ditahan sejak 24 Juli 2026.
- Ditiptikan di Rutan KPK Cabang Gedung Merah Putih.
- Diberhentikan sementara dari status jaksa.

Pengegeledahan

- Dilakukan di 13 lokasi.
- Mencakup rumah di Sentul, rumah di Radio Dalam, ruko money changer, dan sejumlah lokasi lainnya.

Barang Bukti Disita

- 74 kg emas batangan.
- USD 4,76 juta.
- SGD 14,08 juta.
- Uang tunai Rp100 juta.
- Valuta asing dari 16 mata uang.
- Dokumen transaksi, gadget, dan dokumen elektronik.

Tim kuasa hukum yang mendampingi Febrie menegaskan bahwa gugatan yang didaftarkan secara resmi ini sama sekali bukan merupakan upaya untuk menghindar atau melarikan diri dari proses hukum yang sedang berjalan. Sebaliknya, langkah ini ditegaskan sebagai mekanisme konstitusional serta hak asasi yang dijamin oleh undang-undang guna memastikan seluruh tahapan penanganan perkara tetap berjalan ketat dalam koridor hukum acara pidana serta menghormati prinsip-prinsip due process of law..

“Gugatan ini diajukan untuk menguji sah atau tidaknya penetapan tersangka, penahanan, hingga upaya paksa pengegeledahan dan penyitaan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung dan Polri,” tegas Febrie Diansyah, salah satu penasihat hukum Febrie Adriansyah, saat memberikan keterangan pers resmi di Jakarta, Selasa

Dalam penjelasan komprehensifnya, kubu Febrie Adriansyah membeberkan sedikitnya sembilan poin kejanggalaan mendasar dalam proses penanganan perkara ini. Poin-poin tersebut mencakup indikasi penetapan tersangka yang terkesan terburu-buru, ketidakjelasan tindak pidana asal (predicate crime) korupsi yang menjadi pintu masuk sangkaan TPPU, serta dugaan kuat pelanggaran Pasal 100 Ayat 5 KUHP terkait syarat teknis dan syarat administratif penahanan.

Selain itu, tim kuasa hukum mempertanyakan dasar penyitaan emas seberat 74 kilogram serta uang dalam berbagai mata uang dengan nilai setara sekitar Rp543 miliar yang disita di kawasan Sentul. Mereka juga menilai terdapat sejumlah kejanggalaan dalam proses pengegeledahan di kediaman pribadi, penggunaan dasar hukum dalam penyidikan, penggabungan subjek dan objek penyidikan tanpa pemisahan prosedur yang jelas, serta mendalilkan adanya indikasi pemaksaan perkara (maladministration process).

Febrie Diansyah menekankan pentingnya aparat penegak hukum bertindak cermat, terukur, dan tidak tergesa-gesa dalam menetapkan status hukum seseorang, terlebih dalam kasus yang menyedot perhatian publik secara luas.

“Jangan sampai kemudian proses penegakan hukumnya keliru, melanggar aturan hukum, sehingga

hak-hak orang terabaikan. Penegakan hukum secara terburu-buru, mengabaikan prosedur hukum acara dan tidak memenuhi prinsip kehati-hatian tidak hanya merugikan hak tersangka tetapi menjadi indikasi penegakan hukum yang dilakukan dipaksakan,” ujar Febrie secara tajam.

Mengenai tumpukan barang bukti bernilai sangat besar yang disita dari kediaman di Sentul, tim kuasa hukum mendesak agar penyidik membuktikan keterkaitan serta status hukumnya secara terbuka, akuntabel, dan sah di muka persidangan praperadilan.

Tim pengacara menilai bahwa tanpa bukti permulaan yang kuat mengenai asal-usul aset tersebut, penyitaan berisiko menjadi bentuk kesewenang-wenangan.

“Itu yang harus dibuktikan oleh penyidik. Yang pasti begini, ini poin utamanya ya: harus dibuktikan emas itu punya siapa, itu yang pertama. Emas dan uang valas yang ditemukan ya. Harus dibuktikan asal-usulnya bagaimana. Asal-usulnya apakah itu dari sumber yang sah atau sumber yang tidak sah. Itu kan ada banyak kemungkinan,” lanjut Febrie Diansyah usai membesuk kliennya di rumah tahanan.

Senada dengan Febrie, anggota tim advokat lainnya, Firman Wijaya, menerangkan pertimbangan taktis di balik pengajuan dua berkas permohonan praperadilan secara terpisah di PN Jakarta Selatan. Strategi ini diambil lantaran objek yang diuji serta konstruksi batu uji hukumnya memiliki karakteristik yang berbeda.

“Kedua permohonan itu kami akan ajukan secara terpisah karena ini juga bagian dari strategi yang dimungkinkan dalam hukum acara pidana, termasuk hukum acara pidana yang baru, juga karena alasan objek dan tindakan memang diuji secara berbeda. Jadi batu ujinya akan berbeda,” jelas Firman Wijaya mendetail.

Sementara itu, praktisi hukum sekaligus anggota tim advokat Febrie, Muhammad Farizi, mengungkapkan adanya indikasi penyimpangan teknis yang substansial pada proses penahanan kliennya. Menurutnya, penetapan tersangka dan penahanan terkesan dilakukan secara mendadak tanpa pemenuhan dua alat bukti yang cukup terkait tindak pidana utamanya.

“Di sana kita melihat nuansa yang sangat besar adanya pelanggaran Pasal 100 Ayat 5 dari KUHP untuk upaya paksa penahanan, dan upaya paksa penetapan tersangkanya kita melihat ada kaitan-kaitan dengan predicate crime-nya persoalannya di

sana, itu secara garis besarnya,” ungkap Farizi.

Kejagung Siap, Sesuai SOP

Menanggapi gelombang perlawanan hukum dan tuduhan kejanggalaan dari pihak tersangka, Kejaksaan Agung menegaskan kesiapannya untuk meladeni seluruh gugatan praperadilan tersebut. Pihak Kejaksaan optimistis dapat membuktikan keabsahan setiap prosedur yang telah dijalankan penyidik serta membatalkan tuduhan penyimpangan hukum acara di hadapan hakim tunggal nantinya.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Anang Supriatna, memastikan bahwa penyidik telah bekerja sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) dan undang-undang yang berlaku. Penyidik siap membongkar konstruksi perkara serta bukti-bukti keterkaitan aset fantasis tersebut secara terang benderang.

“Semua itu nanti akan kita buktikan di persidangan. Penyidik sedang mendalami saksi-saksi dan alat-alat bukti, barang bukti, termasuk kepemilikan emas dan uang-uang yang sudah disita oleh penyidik,” tegas Anang.

Di sisi lain, perkembangan perkara ini berujung pada sanksi tegas administratif di internal Korps Adhyaksa. Jaksa Agung ST Burhanuddin secara resmi memberhentikan sementara Febrie Adriansyah dari statusnya sebagai jaksa. Sebelum keputusan ini keluar, Febrie diketahui telah lebih dulu dicopot dari jabatannya sebagai Jampidsus usai terseret kasus dugaan korupsi dan TPPU tersebut.

Usulan pemberhentian sementara ini sebelumnya dilayangkan secara resmi oleh Ketua Tim 9 Kejagung sekaligus Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas), Rudi Margono. Langkah penonaktifan ini diambil sebagai prosedur baku agar pemeriksaan perkara berjalan objektif.

“Benar, saat ini Pak FA sudah diberhentikan sementara. Jaksa Agung yang memberhentikan,” mengonfirmasi Kapuspenkum Kejagung, Anang Supriatna, pada Selasa (4/8/2026).

Pemberlakuan keputusan pemberhentian sementara dari status jaksa ini akan terus berjalan sampai kasus hukum yang menjerat Febrie berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde). Anang menegaskan, seluruh proses pemberhentian sementara ini telah sepenuhnya mengacu dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.(wid,ist,kum,ant/dya)





KETUA DPRD SURABAYA: SINERGI JADI KUNCI KEAMANAN KOTA

SURABAYA – Ketua DPRD Kota Surabaya Syaifudin Zuhri atau yang akrab disapa Kaji Ipuk menegaskan, menjaga keamanan dan kondusivitas Kota Pahlawan tidak bisa hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum maupun pemerintah daerah. Menurutnya, stabilitas keamanan hanya dapat terwujud melalui sinergi seluruh elemen masyarakat. Mulai dari pemerintah, TNI-Polri, hingga perangkat wilayah dan warga di tingkat akar rumput.

Karena itu, Kaji Ipuk mendorong penguatan koordinasi, komunikasi dan sistem deteksi dini terhadap berbagai potensi gangguan keamanan. Upaya tersebut dinilai penting mengingat Surabaya merupakan kota metropolitan dengan tingkat mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi yang sangat tinggi.

"Surabaya ini kota metropolitan. Berbagai macam ras, suku, agama, dan kelompok hidup berdampingan. Karena itu kita harus mampu melakukan mitigasi, melakukan pencegahan, sekaligus membangun deteksi dini terhadap setiap potensi gangguan keamanan," kata Kaji Ipuk, Selasa (4/8/2026).

Ia menjelaskan, Surabaya menjadi pusat perdagangan, jasa, pendidikan, industri, hingga ekonomi kreatif di Jawa Timur. Di saat yang sama, kota ini dihuni masyarakat dengan latar belakang suku, agama, ras, budaya, dan kepentingan sosial yang sangat beragam.

Menurutnya, keberagaman tersebut merupakan modal sosial yang harus dijaga. Namun, tanpa komunikasi yang baik dan langkah antisipatif, potensi gesekan sosial dapat berkembang menjadi persoalan yang mengganggu stabilitas daerah.

"Keberagaman adalah kekuatan Surabaya. Karena itu harus dijaga dengan komunikasi yang baik, mitigasi, dan pencegahan agar potensi persoalan tidak berkembang menjadi konflik," ujarnya.

Kaji Ipuk menekankan, keamanan kota bukan hanya menjadi tugas pemerintah, wali kota, TNI, Polri, maupun perangkat RT dan RW. Seluruh masyarakat memiliki tanggung jawab yang sama untuk menjaga lingkungan tetap aman dan kondusif.

"Surabaya tidak bisa dijaga hanya oleh pemerintah, Pak Wali Kota, RT, RW, ataupun aparat keamanan saja. Kota ini hanya bisa aman kalau seluruh



komponen memiliki kesadaran bersama untuk menjaganya," tegasnya.

Menurut dia, keamanan memiliki keterkaitan langsung dengan keberlangsungan aktivitas ekonomi. Sebagai salah satu pusat perdagangan dan jasa terbesar di Indonesia, Surabaya membutuhkan situasi yang stabil agar investasi, dunia usaha, dan aktivitas masyarakat dapat berjalan tanpa hambatan.

Ia mengingatkan, setiap gangguan keamanan akan memberikan efek berantai terhadap perekonomian, mulai dari menurunnya kepercayaan pelaku usaha hingga terganggunya aktivitas masyarakat.

"Kalau Surabaya tidak kondusif, maka ekonomi pasti akan terganggu. Padahal negara berkewajiban menjamin rasa aman, ketenangan, dan kesejahteraan masyarakat," katanya.

Karena itu, ia menilai pendekatan preventif harus menjadi prioritas. Potensi persoalan sosial harus dikenali sejak dini sehingga dapat diselesaikan sebelum berkembang menjadi konflik yang lebih besar.

Untuk memperkuat koordinasi antarinstansi, Kaji Ipuk mengusulkan agar Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) rutin menggelar silaturahmi secara bergilir.

Menurutnya, pertemuan tersebut tidak harus selalu berlangsung dalam forum formal. Pertemuan yang lebih santai justru dapat mempererat hubungan antarpimpinan sehingga koordinasi ketika menghadapi persoalan di lapangan menjadi lebih cepat dan efektif.

"Silaturahmi Forkopimda kita

rutinkan. Kemarin di DPRD, nanti bisa di tempat Dandim, berikutnya di Polrestabes. Kita bergiliran supaya kebersamaan itu benar-benar terbangun," ujarnya.

Ia mengatakan, hubungan personal yang baik antar lembaga akan mempermudah komunikasi ketika muncul persoalan di masyarakat. Dengan demikian, penyelesaian masalah tidak harus selalu menunggu forum resmi.

"Bukan hanya bertemu saat rapat resmi, tetapi membangun kebersamaan sebagai satu tanggung jawab bersama menjaga kota," imbuhnya.

Selain melalui forum Forkopimda, Kaji Ipuk juga mendorong budaya komunikasi informal, seperti kegiatan "ngopi" atau "nyangkruk" yang melibatkan unsur pemerintah, aparat keamanan, dan tokoh masyarakat.

Menurutnya, forum informal mampu menciptakan ruang dialog yang lebih terbuka sehingga berbagai persoalan di masyarakat dapat disampaikan lebih awal dan menjadi bagian dari sistem deteksi dini.

Lebih jauh, ia menilai pola komunikasi tersebut harus diperluas hingga ke tingkat kecamatan dan kelurahan. Camat, kapolsek, danramil, lurah, hingga Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) perlu membangun koordinasi yang kuat dan berkelanjutan.

Soal Pagar Tinggi Mal

Pemasangan pagar tinggi di sejumlah pusat perbelanjaan di Surabaya menjelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan RI juga menjadi Ketua DPRD Surabaya Syaifudin Zuhri. Kaji Ipuk menilai langkah pengelola mal sebagai bentuk peningkatan kewaspadaan, namun meminta agar tidak dimaknai sebagai kondisi yang memicu kepanikan di tengah masyarakat.

Menurut Kaji Ipuk, pengelola pusat perbelanjaan tidak perlu bersikap berlebihan dalam menyikapi situasi keamanan. "Pemilik mal sebaiknya juga tidak perlu paranoid," ujarnya.

Selain aspek keamanan, DPRD juga menyoroti dampak pemasangan pagar terhadap penataan kota. Kaji Ipuk mengatakan setiap perubahan fisik bangunan harus tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku, baik dari sisi tata ruang, estetika kota, maupun perizinan. Menurutnya, kebutuhan akan pengamanan harus tetap sejalan dengan upaya menjaga wajah Kota Surabaya sebagai kota metropolitan.

Karena itu, DPRD bersama Pemerintah Kota Surabaya akan mengkaji keberadaan pagar yang dipasang di sejumlah pusat perbelanjaan. Evaluasi tersebut mencakup kesesuaian dengan regulasi yang berlaku, termasuk kemungkinan penyesuaian apabila hasil kajian menunjukkan adanya ketidaksesuaian terhadap aturan penataan kota. (adv,ama/dya)

